



Integrasi Nilai Anti Korupsi pada Pembelajaran PPKn Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 113 Kota Jambi (Implikasinya dalam Kehidupan Sehari Hari)

Putri Ramadani*, Saidah Ahmad, Donal Saputra

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: putrimdni2004@gmail.com*, saidahsaidah@uinjambi.ac.id,

donalsaputra@uinjambi.ac.id

Keywords:

Integration of Anti-Corruption Values; Civic Education (PPKn); Elementary School.

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of introducing and fostering the practice of anti-corruption values from an early age as a preventive measure against future corrupt behavior. This study aims to describe: (1) anti-corruption values that have been optimally integrated into Civics (PPKn) learning; (2) teacher strategies in integrating anti-corruption values into PPKn learning; and (3) the implications of anti-corruption value integration on the behavior of Grade IV students at SDN 113 Kota Jambi. A qualitative phenomenological approach was employed. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis followed the Miles and Huberman model, comprising data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity was established through source and technique triangulation. The findings indicate that anti-corruption value integration is carried out through stages of introduction, contextualization, action, reflection, and follow-up. Anti-corruption values integrated include honesty, responsibility, discipline, care, independence, hard work, simplicity, courage, and justice. Teaching strategies include Problem Based Learning (PBL), PowerPoint media, group discussion, educational games, modeling, reinforcement, habituation activities, and reflection. The integration has positive implications for student behavior, with students showing improved attitudes of responsibility, honesty, discipline, and care in daily life. Supporting factors include school support, teacher modeling, and student participation, while inhibiting factors include differences in student character, limited instructional time, and external environmental influences.

Kata Kunci:

Integrasi Nilai Anti Korupsi; Pembelajaran PPKn; Sekolah Dasar.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya mengenalkan dan membiasakan penerapan nilai-nilai anti korupsi sejak usia dini sebagai langkah preventif terhadap perilaku korupsi di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) nilai-nilai anti korupsi yang telah diintegrasikan secara optimal dalam pembelajaran PPKn; (2) strategi guru dalam mengintegrasikan nilai anti korupsi pada pembelajaran PPKn; dan (3) implikasi dari integrasi nilai anti korupsi terhadap perilaku siswa kelas IV SDN 113 Kota Jambi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data ditentukan melalui

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai anti korupsi dilaksanakan melalui tahapan pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Nilai anti korupsi yang diintegrasikan meliputi kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian, kemandirian, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Strategi yang digunakan guru meliputi Problem Based Learning (PBL), media PowerPoint, diskusi kelompok, game edukatif, keteladanan, penguatan, pembiasaan, dan refleksi. Integrasi tersebut memberikan implikasi positif terhadap perilaku siswa, yakni siswa menunjukkan perubahan sikap lebih bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan peduli dalam kehidupan sehari-hari. Faktor pendukung meliputi dukungan sekolah, keteladanan guru, dan partisipasi siswa, sedangkan faktor penghambat meliputi perbedaan karakter siswa, keterbatasan waktu, dan pengaruh lingkungan luar sekolah.

PENDAHULUAN

Pendidikan dalam negeri bertekad menghasilkan generasi bangsa yang unggul, baik dari segi keterampilan maupun penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, pesatnya perkembangan era globalisasi secara tidak langsung memberikan dampak terhadap keberlangsungan pendidikan di Indonesia dan menjadi salah satu faktor munculnya degradasi moral. Salah satu bentuk degradasi moral tersebut ialah tindakan korupsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Kholid, (2025) menyatakan bahwa korupsi merupakan persoalan serius yang merusak tatanan sosial dan ekonomi suatu negara, sehingga upaya pencegahannya perlu dilakukan sejak usia dini melalui jalur pendidikan. (Kenneth, 2024) menggambarkan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja melanggar hukum melalui penyalahgunaan keuangan atau dana publik demi kepentingan pribadi. Berbagai kasus korupsi besar telah terjadi di Indonesia, termasuk di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Jiwasraya, PT Asabri, Garuda Indonesia, dan PLN. (Ripho Delzy Perkasa, 2024) mengemukakan bahwa korupsi berdampak ke masyarakat, yaitu selain menimbulkan kerugian ekonomi, korupsi juga memperdalam ketimpangan sosial sehingga akses terhadap layanan publik menjadi semakin sulit bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam perspektif Islam, (Al-Banjari, 2024) menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan ilahi dan nilai-nilai Islam yang mengajarkan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab.

Pradipta, (2025) menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu langkah yang diinisiasi oleh KPK adalah pengembangan dan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di sekolah. (Suyitno, 2024) menyatakan bahwa pemberian pendidikan anti korupsi di sekolah dasar merupakan langkah yang tepat, karena secara sosiologis dan psikologis anak usia sekolah dasar berada pada tahap perkembangan moral, sosial, dan kognitif yang lebih matang dibandingkan anak usia prasekolah, sehingga mampu

memahami konsep benar dan salah, kejujuran, tanggung jawab, serta akibat dari suatu tindakan. (Saputra, 2025) mengemukakan bahwa nilai-nilai anti korupsi dapat diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran, salah satunya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). (Nugraha, 2025) menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam pembelajaran berbasis *problem based learning* memiliki pemahaman dan internalisasi yang lebih baik dibandingkan siswa yang hanya menerima materi secara konvensional.

Pendidikan memiliki posisi strategis dalam membangun budaya antikorupsi karena sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai lembaga pembentukan karakter, sikap, dan perilaku peserta didik. Penanaman nilai antikorupsi sejak jenjang sekolah dasar menjadi langkah penting karena pada tahap tersebut peserta didik mulai membangun pemahaman mengenai konsep benar dan salah, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, serta kepatuhan terhadap aturan. Pendidikan antikorupsi pada usia dini diharapkan mampu membentuk kebiasaan positif yang akan menjadi karakter dalam kehidupan peserta didik di masa mendatang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai upaya preventif dalam membangun generasi yang memiliki integritas dan kesadaran terhadap bahaya perilaku koruptif.

Salah satu mata pelajaran yang memiliki relevansi kuat dalam penguatan nilai antikorupsi adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pembelajaran PPKn tidak hanya berorientasi pada pemahaman konsep kewarganegaraan, tetapi juga bertujuan membentuk karakter peserta didik melalui nilai-nilai Pancasila, tanggung jawab sosial, kepatuhan terhadap norma, dan kesadaran sebagai warga negara. Penelitian (Kholid et al., 2025) menunjukkan bahwa integrasi nilai antikorupsi dalam Kurikulum Merdeka membutuhkan strategi pembelajaran yang sistematis melalui keterlibatan guru, materi pembelajaran, dan budaya sekolah. Selanjutnya, (Saputra, 2025) menjelaskan bahwa pembelajaran PPKn dapat menjadi media efektif dalam membangun budaya antikorupsi karena memiliki keterkaitan langsung dengan pembentukan karakter dan moral peserta didik. Hal tersebut menunjukkan bahwa PPKn memiliki potensi besar sebagai instrumen pendidikan preventif terhadap perilaku koruptif.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan perilaku peserta didik. (Suyitno et al., 2024) menemukan bahwa literasi antikorupsi berbasis Profil Pelajar Pancasila mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai nilai integritas dan tanggung jawab. Selain itu, penelitian (Nur, 2021) menunjukkan bahwa penerapan pendidikan antikorupsi pada siswa sekolah dasar dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya kejujuran dan perilaku bertanggung jawab. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada konsep pendidikan antikorupsi, pengembangan kurikulum, atau pemahaman siswa terhadap nilai antikorupsi. Kajian yang secara mendalam menggambarkan bagaimana proses integrasi nilai antikorupsi dilakukan oleh guru dalam pembelajaran PPKn serta bagaimana dampaknya terhadap perilaku keseharian siswa masih relatif terbatas.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Pendidikan antikorupsi tidak hanya membutuhkan pemahaman teoritis, tetapi juga proses internalisasi nilai melalui pengalaman belajar yang nyata dan berkelanjutan. Dalam konteks sekolah dasar, keberhasilan pendidikan antikorupsi sangat dipengaruhi oleh strategi guru, metode pembelajaran, budaya sekolah, serta keterlibatan lingkungan sekitar peserta didik. Namun, penelitian mengenai tahapan integrasi nilai antikorupsi, strategi pembelajaran yang digunakan guru, serta faktor pendukung dan penghambat implementasinya pada pembelajaran PPKn di sekolah dasar masih membutuhkan kajian empiris yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian yang mengangkat praktik nyata integrasi nilai antikorupsi dalam pembelajaran menjadi penting untuk dilakukan.

Fenomena tersebut terlihat pada Sekolah Dasar Negeri 113 Kota Jambi yang memiliki perhatian terhadap penguatan karakter peserta didik melalui pembelajaran PPKn dan berbagai kegiatan pembiasaan sekolah. Berdasarkan kondisi penelitian, guru tidak hanya menyampaikan materi antikorupsi secara konseptual, tetapi juga mengintegrasikan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian, kemandirian, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan melalui aktivitas pembelajaran seperti Problem Based Learning (PBL), diskusi kelompok, permainan edukatif, keteladanan guru, penguatan, serta refleksi pembelajaran. Implementasi tersebut menarik untuk dikaji karena menunjukkan bahwa nilai antikorupsi dapat diterapkan melalui aktivitas sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, bukan hanya melalui pembelajaran teoritis mengenai korupsi.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperkuat pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa sejak jenjang pendidikan dasar. Pembentukan perilaku antikorupsi tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan proses pembiasaan yang konsisten melalui lingkungan pendidikan yang mendukung. Dengan memahami bagaimana guru mengintegrasikan nilai antikorupsi dalam pembelajaran PPKn, sekolah dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam membangun budaya integritas. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan pendidikan karakter yang lebih aplikatif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan peserta didik di tingkat sekolah dasar.

Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian mendalam mengenai proses integrasi sembilan nilai antikorupsi dalam pembelajaran PPKn serta implikasinya terhadap perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas pendidikan antikorupsi secara umum, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai tahapan implementasi nilai antikorupsi mulai dari pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, hingga tindak lanjut. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi strategi guru, faktor pendukung, dan faktor penghambat dalam proses internalisasi nilai antikorupsi pada siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 113 Kota Jambi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai antikorupsi yang diintegrasikan dalam pembelajaran PPKn, mengidentifikasi strategi

guru dalam mengintegrasikan nilai antikorupsi, serta menganalisis implikasi integrasi tersebut terhadap perilaku siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 113 Kota Jambi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan kajian pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan, serta memberikan manfaat praktis bagi guru, sekolah, dan pemangku kebijakan pendidikan dalam merancang strategi pembelajaran yang mampu membangun budaya integritas sejak dini. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran PPKn dapat menjadi salah satu upaya berkelanjutan dalam menciptakan generasi yang memiliki karakter jujur, bertanggung jawab, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai antikorupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jailani, (2023) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang bergantung pada pengamatan manusia dalam kondisi alamiah. (Sugiyono, 2017; Ahmad et al., 2023) menyebut penelitian kualitatif sebagai metode *naturalistic* karena dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologis, yang menurut Georgi (2009) bertujuan untuk menggambarkan pengalaman individu terkait suatu fenomena tertentu. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena kompleks mengenai bagaimana guru mengintegrasikan nilai anti korupsi pada pembelajaran PPKn serta apa implikasinya dalam kehidupan sehari-hari siswa.

Penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 113 Kota Jambi yang beralamat di Jalan KS Tubun, Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi. Sekolah ini dipilih karena memiliki komitmen dalam pelaksanaan nilai-nilai anti korupsi yang diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan pembiasaan setiap pagi. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2016). Adapun data informan penelitian disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan	Klasifikasi	Jumlah
1	Guru PPKn Kelas IV	Informan Kunci	1
2	Kepala Sekolah	Informan Pendukung	1
3	Siswa/i Kelas IV	Informan Pendukung	5

Sumber: Data Penelitian (2026)

Teknik pengumpulan data meliputi tiga cara. Pertama, observasi nonpartisipan yaitu peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan integrasi nilai anti korupsi pada pembelajaran PPKn dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari siswa (Hasibuan, 2023). Kedua, wawancara semi terstruktur dengan guru PPKn kelas IV, kepala sekolah, dan siswa kelas IV untuk memperoleh data yang lebih mendalam. Ketiga, dokumentasi berupa foto kegiatan pembelajaran, perangkat pembelajaran, profil sekolah, serta

dokumen-dokumen yang relevan untuk memverifikasi data hasil observasi dan wawancara.

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (Abdusamad, 2021) yang terdiri dari tiga alur: (1) *Reduksi Data* yaitu menyeleksi, mengelompokkan, dan memusatkan perhatian pada data yang relevan; (2) *Penyajian Data* yaitu menyusun dan menyajikan data secara sistematis berdasarkan fokus penelitian; dan (3) *Penarikan Kesimpulan* yaitu merangkum hasil akhir menjadi data yang valid, objektif, dan komprehensif. Kejenuhan data dicapai ketika proses pengumpulan data tidak lagi menghasilkan informasi baru. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber—membandingkan hasil wawancara dari guru PPKn, kepala sekolah, dan siswa—serta triangulasi teknik—membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Susanto & Jailani, 2023; Husnullail et al., 2024).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari subjek utama penelitian melalui kegiatan observasi dan wawancara, mencakup informasi, pendapat, serta kondisi nyata di lapangan terkait integrasi nilai anti korupsi pada pembelajaran PPKn. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan seperti jurnal, buku, perangkat pembelajaran, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar Negeri 113 Kota Jambi.

Prosedur wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada tiga kelompok informan: Guru PPKn kelas IV (sebagai informan kunci), Kepala Sekolah (sebagai informan pendukung), dan lima orang siswa kelas IV (sebagai informan pendukung). Jenis observasi yang digunakan adalah observasi nonpartisipan, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan tetapi berperan sebagai pengamat. Data hasil observasi dicatat secara sistematis dalam bentuk catatan lapangan. Dokumentasi yang dikumpulkan meliputi foto kegiatan pembelajaran, perangkat pembelajaran, profil sekolah, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pelaksanaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum SDN 113 Kota Jambi

Sekolah Dasar Negeri 113 Kota Jambi merupakan salah satu lembaga pendidikan dasar formal berstatus negeri yang berada di bawah naungan Pemerintah Kota Jambi dan Dinas Pendidikan Kota Jambi. Sekolah ini berdiri sejak tanggal 1 Desember 1980 dan telah memperoleh akreditasi B. Pada tahun ajaran 2025/2026, jumlah peserta didik tercatat sebanyak 126 siswa yang tersebar pada enam tingkat kelas dengan 13 tenaga pendidik. Profil lengkap sekolah disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Profil SDN 113 Kota Jambi

No	Uraian	Keterangan
1	Nama Sekolah	Sekolah Dasar Negeri 113 Kota Jambi
2	NPSN	10504685
3	Status Sekolah	Negeri
4	Alamat	Jln. KS Tubun Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi

No	Uraian	Keterangan
5	Tanggal Berdiri	1 Desember 1980
6	Akreditasi	B (8 Desember 2021)
7	Jumlah Tenaga Pendidik	13 Guru
8	Jumlah Peserta Didik 2025/2026	126 Siswa
9	Visi	Mewujudkan Profil Pelajar Industri yang Bertakwa, Cerdas, Mandiri, dan Berbudaya Lingkungan

Sumber: Data Sekolah (2026)

Visi sekolah adalah "Mewujudkan Profil Pelajar Industri yang Bertakwa, Cerdas, Mandiri, dan Berbudaya Lingkungan". Misi sekolah antara lain mewujudkan suasana sekolah yang kondusif dalam membentuk profil pelajar yang beriman dan bertakwa, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik di bidang IPTEK, seni, bahasa, dan olahraga, melaksanakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, menjalin kerja sama yang harmonis antara warga sekolah dengan lingkungan sekitar, serta meningkatkan mutu profesionalisme guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan. Dalam menjalankan proses pendidikan, Sekolah Dasar Negeri 113 Kota Jambi tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap pembentukan karakter peserta didik melalui berbagai program pembiasaan dan kegiatan pendidikan karakter yang dilaksanakan secara rutin setiap pagi, seperti kegiatan literasi digital, pembiasaan budaya sekolah, pengelolaan uang kas secara demokratis, serta penerapan antri tertib dalam berbagai situasi.

Keadaan guru di Sekolah Dasar Negeri 113 Kota Jambi mendukung pelaksanaan integrasi nilai anti korupsi. Guru PPKn kelas IV merupakan guru yang memiliki kompetensi dalam mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Keadaan siswa yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah tidak mengurangi semangat dan antusiasme mereka dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sekolah juga memiliki sarana dan prasarana yang mendukung, meliputi ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas I–VI, perpustakaan, ruang serbaguna, UKS, kantin, dan fasilitas toilet. Keberadaan sarana tersebut memungkinkan berbagai strategi pembelajaran inovatif seperti penggunaan media PowerPoint dan game edukatif dapat diterapkan secara efektif.

Nilai-Nilai Anti Korupsi yang Diintegrasikan dalam Pembelajaran PPKn

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, diperoleh temuan bahwa kesembilan nilai anti korupsi telah diintegrasikan secara optimal dalam pembelajaran PPKn siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 113 Kota Jambi. Nilai-nilai tersebut tidak hanya disampaikan melalui materi pembelajaran, tetapi juga diterapkan melalui kegiatan pembiasaan, keteladanan guru, serta berbagai kegiatan pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif siswa. Tabel 4 menyajikan keterkaitan materi PPKn dengan nilai-nilai anti korupsi.

Tabel 4. Kaitan Materi PPKn dengan Nilai Anti Korupsi

No	Materi PPKn	Nilai Anti Korupsi	Penjelasan
1	Pancasila sebagai Nilai Kehidupan	Kejujuran	Materi ini mengajarkan berperilaku sesuai nilai Pancasila, termasuk bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari
2	Konstitusi dan Norma di Masyarakat	Tanggung Jawab, Disiplin, Kemandirian	Materi ini membahas aturan, hak, kewajiban, dan pendapat sehingga menuntut sikap tanggung jawab, disiplin, dan mandiri
3	Membangun Jati Diri dalam Kebhinekaan	Kepedulian	Materi ini membahas jati diri dalam kebhinekaan sehingga menumbuhkan sikap peduli, menghargai keberagaman, dan menjaga kerukunan
4	Negaraku Indonesia	Keberanian, Keadilan	Materi ini menuntut sikap berani menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, serta adil terhadap seluruh warga negara Indonesia
5	Pola Hidup Gotong Royong	Kerja Keras, Kesederhanaan	Materi ini menuntut kerja keras untuk mencapai tujuan bersama dan hidup sederhana tanpa berlebihan

Sumber: Penelitian (2025)

Nilai kejujuran diintegrasikan secara optimal melalui pembiasaan mengerjakan tugas secara mandiri, berkata jujur, tidak menyontek, serta berani mengakui kesalahan. Berdasarkan wawancara dengan guru PPKn, disebutkan: "Dalam pembelajaran PPKn, saya mengintegrasikan nilai kejujuran karena sangat penting diajarkan sejak usia sekolah dasar. Saya membiasakan siswa untuk menyampaikan pendapat sesuai fakta, mengembalikan barang yang bukan miliknya, mengerjakan tugas dengan usaha sendiri." Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa kelas IV telah menampilkan perilaku jujur selama proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Agus Wibowo (2012) bahwa kejujuran merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai pribadi yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

Nilai tanggung jawab diintegrasikan melalui pembiasaan menyelesaikan tugas tepat waktu, melaksanakan piket kelas, menjaga kebersihan lingkungan, serta menerima konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Guru PPKn menyatakan: "Saya memberikan tanggung jawab kepada setiap siswa seperti menjadi ketua kelompok, memimpin doa, mempresentasikan hasil diskusi, dan melaksanakan piket sesuai jadwal. Dengan pembiasaan yang dilakukan terus-menerus, saya melihat sebagian besar siswa mulai terbiasa melaksanakan kewajibannya tanpa harus selalu diingatkan." Temuan ini sejalan dengan pendapat Thomas Lickona (1991) bahwa tanggung jawab merupakan kemampuan melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya serta bersedia menerima konsekuensi dari setiap keputusan dan tindakan.

Nilai disiplin diintegrasikan melalui pembiasaan datang tepat waktu, mengikuti pembelajaran dengan tertib, mengumpulkan tugas sesuai waktu, mematuhi tata tertib, dan melaksanakan piket kelas. Mulyadi (2021) menyatakan bahwa disiplin berkaitan dengan

kemampuan mengendalikan diri, mematuhi aturan, serta melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Dwijendra (2023) menambahkan bahwa disiplin merupakan keadaan tertib di mana setiap individu bersedia mematuhi peraturan yang berlaku dengan penuh kesadaran tanpa paksaan.

Nilai kepedulian dikembangkan melalui kegiatan saling membantu teman, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, serta menunjukkan empati terhadap teman yang mengalami kesulitan. Nabila (2023) menyatakan bahwa kepedulian merupakan komponen penting dalam pendidikan karakter yang mencerminkan sikap perhatian, empati, dan keinginan membantu orang lain.

Nilai kemandirian dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengelola tugas dan tanggung jawabnya sendiri, berinisiatif dalam belajar, dan berani bertanya ketika mengalami kesulitan. Guru PPKn menyatakan: "Kemandirian merupakan salah satu sikap yang selalu saya kembangkan dalam pembelajaran PPKn. Saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir dan menyelesaikan tugas sesuai kemampuan mereka sendiri. Saya juga mendorong mereka agar tidak langsung bergantung kepada teman atau guru ketika menghadapi kesulitan." Agung (2024) menyatakan bahwa kemandirian merupakan kemampuan individu untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan dirinya sendiri dalam berpikir, bersikap, dan bertindak tanpa bergantung kepada orang lain. Siswa yang memiliki sikap mandiri akan lebih percaya diri, memiliki inisiatif dalam belajar, serta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Nilai kerja keras dikembangkan melalui aktivitas pembelajaran yang mendorong siswa untuk berusaha secara maksimal, tidak mudah menyerah, tekun, dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas. Guru PPKn menyatakan: "Saya selalu mengajak siswa untuk membiasakan bekerja keras dalam setiap kegiatan pembelajaran. Saya mendorong mereka agar menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, tidak mudah menyerah ketika mengalami kesulitan, dan terus berusaha sampai tugas selesai." Berdasarkan hasil observasi, seluruh siswa kelas IV telah menunjukkan sikap kerja keras dalam mengikuti pembelajaran. Hal tersebut terlihat dari kesungguhan siswa dalam menyelesaikan tugas, keaktifan dalam diskusi, dan ketekunan mereka. Alfiana (2021) menyatakan bahwa kerja keras merupakan sikap sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan tidak mudah menyerah saat menghadapi hambatan.

Nilai kesederhanaan diterapkan melalui pembiasaan menggunakan perlengkapan belajar sesuai kebutuhan, memanfaatkan fasilitas sekolah secara bijaksana, dan menjaga barang-barang yang dimiliki. Rahmadona (2020) menyatakan kesederhanaan adalah sikap hidup tidak berlebihan serta menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan. Nilai keberanian diintegrasikan melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, presentasi, dan berbagai aktivitas yang memberikan kesempatan siswa aktif berpartisipasi. Toha (2025) mengemukakan bahwa individu yang berani mampu menyampaikan pendapat, mengakui kesalahan, dan mempertahankan kebenaran. Nilai keadilan diintegrasikan melalui pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh siswa untuk berpartisipasi, pembagian tugas kelompok yang seimbang, serta perlakuan adil tanpa membedakan. Yanti

(2024) menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan porsinya masing-masing.

Pelaksanaan Integrasi Nilai Anti Korupsi melalui Tahapan Pembelajaran

Pelaksanaan pengintegrasian nilai anti korupsi dalam pembelajaran PPKn dilaksanakan mengikuti alur (sequence) yang terdiri atas lima tahapan yang diilustrasikan dalam kerangka model Input-Proses-Output berikut.

Tabel 5. Kerangka Model Integrasi Nilai Anti Korupsi (Input-Proses-Output)

INPUT	PROSES	OUTPUT
Sumber Daya Manusia: • Guru PPKn (merancang pembelajaran) • Kepala Sekolah (pendukung kebijakan) • Siswa Kelas IV (subjek utama) Sumber Daya Lain: • Waktu (alokasi pembelajaran) • Sarana dan Prasarana • Metode: PBL, Diskusi Kelompok, PowerPoint, Game Edukatif	Tahapan Integrasi: 1. Pengenalan: guru memperkenalkan konsep nilai anti korupsi 2. Kontekstualisasi: mengaitkan nilai anti korupsi dengan kehidupan nyata siswa 3. Aksi: penerapan nilai melalui kegiatan konkret di kelas 4. Refleksi: evaluasi pemahaman dan perilaku siswa 5. Tindak Lanjut: pembiasaan berkelanjutan	Hasil/Implikasi: Terbentuknya peserta didik yang memiliki: • Pemahaman nilai anti korupsi • Sikap dan perilaku anti korupsi • Kemampuan menerapkan nilai dalam kehidupan sehari-hari • Karakter positif dan berintegritas

Sumber: Penelitian (2025)

Tahap *Pengenalan* merupakan tahap awal yang bertujuan memperkenalkan konsep dan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik sebelum memasuki tahap pemahaman dan penerapan yang lebih mendalam. Guru memberikan gambaran umum mengenai materi yang akan dipelajari menggunakan cerita, gambar, video, atau diskusi agar siswa mudah memahami dan memiliki pengetahuan dasar mengenai nilai anti korupsi. Pada tahap ini guru tidak hanya menjelaskan materi pokok PPKn, tetapi juga menyisipkan nilai-nilai anti korupsi yang relevan, sehingga siswa dapat membangun pemahaman awal mengenai keterkaitan antara materi PPKn dengan nilai-nilai anti korupsi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Tahap *Kontekstualisasi* bertujuan mengaitkan materi dengan situasi nyata yang dialami peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan hubungan antara materi pembelajaran dengan pengalaman nyata di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Melalui pendekatan ini, siswa dapat memahami bahwa nilai-nilai anti korupsi tidak hanya berkaitan dengan tindakan di lingkungan pemerintahan, melainkan juga dengan perilaku sehari-hari yang perlu diterapkan sejak dini.

Tahap *Aksi* merupakan penerapan nilai ke dalam perilaku nyata. Siswa dibiasakan mengerjakan tugas secara mandiri, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal, mematuhi tata tertib, menjaga kebersihan lingkungan, berani menyampaikan pendapat dalam diskusi, serta membantu teman yang mengalami kesulitan. Tahap *Refleksi* dilakukan

dengan mengajak siswa mengevaluasi perilaku yang telah dilakukan selama pembelajaran dan dalam kehidupan sehari-hari. Guru memberikan kesempatan kepada siswa menyampaikan pengalaman, pendapat, dan kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan nilai anti korupsi. Tahap *Tindak Lanjut* dilakukan melalui berbagai bentuk pembiasaan, pengawasan, penguatan, dan motivasi agar siswa terus menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Guru bekerja sama dengan pihak sekolah dan orang tua dalam memantau perkembangan perilaku siswa.

Strategi Guru dalam Mengintegrasikan Nilai Anti Korupsi

Dalam mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi pada pembelajaran PPKn, guru menggunakan berbagai strategi yang variatif dan inovatif. Pertama, *Problem Based Learning* (PBL) diterapkan dengan menyajikan permasalahan atau kasus yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Melalui kegiatan ini siswa didorong untuk berpikir kritis, mencari informasi, berdiskusi, dan menemukan solusi. Selama proses tersebut, siswa belajar bersikap jujur dalam menyampaikan pendapat, bertanggung jawab terhadap tugas, dan bekerja sama (Pembelajaran, I., et al., 2024).

Kedua, pemanfaatan *media pembelajaran berbasis PowerPoint* yang memungkinkan materi disajikan secara lebih menarik, sistematis, dan mudah dipahami. Guru menyisipkan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai anti korupsi melalui gambar, ilustrasi, animasi, dan video singkat. Ketiga, *diskusi kelompok* yang mendorong siswa untuk saling bertukar pendapat, menghargai pandangan orang lain, dan berpartisipasi aktif. Melalui kegiatan ini siswa belajar menerapkan nilai kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, keadilan, dan keberanian secara langsung.

Keempat, *game edukatif* yang mengajak siswa belajar dalam suasana menyenangkan dan interaktif. Dalam permainan, siswa dibiasakan mengikuti aturan dengan jujur, menyelesaikan tugas sesuai perannya, dan menghargai hasil tanpa kecurangan. Kelima, *keteladanan guru* yang ditunjukkan melalui sikap datang tepat waktu, melaksanakan tugas dengan baik, bersikap jujur, memperlakukan seluruh siswa secara adil, dan mematuhi aturan sekolah. Keenam, *penguatan dan motivasi* melalui pemberian pujian, apresiasi, dan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan perilaku anti korupsi. Ketujuh, *pembiasaan* yang dilakukan secara terus-menerus dalam berbagai aktivitas sehari-hari di lingkungan sekolah. Kedelapan, *refleksi di akhir pembelajaran* yang mengajak siswa mengingat kembali materi dan menghubungkannya dengan nilai-nilai anti korupsi.

Dalam diskusi kelompok, siswa belajar menerapkan nilai keadilan melalui pembagian tugas yang merata, nilai kepedulian dengan membantu anggota kelompok yang mengalami kesulitan, nilai keberanian dengan menyampaikan pendapat, dan nilai tanggung jawab dengan menyelesaikan bagian tugas yang diberikan. Guru memfasilitasi diskusi agar berlangsung dengan tertib dan produktif, sekaligus mengamati dinamika kelompok untuk memberikan penguatan dan arahan yang diperlukan. Melalui *game edukatif*, nilai anti korupsi dikuatkan dalam konteks yang menyenangkan. Siswa yang bermain dengan jujur, menaati aturan, dan tidak berbuat curang menunjukkan bahwa mereka telah menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Menurut hasil wawancara, siswa lebih

mudah memahami dan mengingat nilai anti korupsi ketika dipelajari dalam suasana yang menyenangkan dibandingkan dengan hanya mendengarkan penjelasan guru.

Pendidikan Anti Korupsi (Pendidikan, F. I., & Yogyakarta, U. N., 2012) menyatakan bahwa media pembelajaran yang efektif dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai anti korupsi. Penggunaan *PowerPoint* dengan gambar, animasi, dan video singkat terbukti membuat penyampaian nilai anti korupsi lebih efektif karena siswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis tetapi juga dapat melihat contoh konkret penerapan nilai. Diskusi kelompok selain melatih kemampuan berargumentasi juga melatih siswa untuk mendengarkan pendapat orang lain dengan sabar dan menghargai perbedaan—yang merupakan salah satu manifestasi nilai keadilan dan kepedulian. Kegiatan pembiasaan yang dilaksanakan setiap pagi di Sekolah Dasar Negeri 113 Kota Jambi mencakup kegiatan literasi, pembiasaan berbaris dengan tertib, doa bersama, dan apel pagi yang secara konsisten memperkuat internalisasi nilai-nilai anti korupsi pada diri siswa. Praktik keteladanan oleh guru memiliki dampak yang sangat signifikan karena siswa pada usia sekolah dasar masih sangat mudah dipengaruhi oleh model perilaku dari orang-orang di sekitarnya, khususnya guru yang menjadi figur otoritas di lingkungan sekolah.

Implikasi Nilai Anti Korupsi terhadap Perilaku Siswa

Integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran PPKn memberikan implikasi positif terhadap perilaku siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 113 Kota Jambi, baik dalam proses pembelajaran maupun di luar kegiatan pembelajaran. Nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami siswa sebagai materi pembelajaran, tetapi juga mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kegiatan pembelajaran, siswa menunjukkan perubahan perilaku yang lebih positif, seperti mengikuti pembelajaran dengan tertib, melaksanakan tugas dengan baik, dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan. Di luar pembelajaran, perubahan perilaku terlihat melalui kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah, keterlibatan dalam menjaga kebersihan lingkungan, pelaksanaan tugas piket, serta interaksi yang baik dengan guru maupun teman. Salah satu contoh nyata adalah perilaku siswa di kantin sekolah; meskipun tidak terdapat pengawasan langsung dari penjaga kantin, para siswa yang membeli makanan tetap membayar sesuai ketentuan yang berlaku—mencerminkan nilai kejujuran yang telah terinternalisasi.

Siswa juga mulai menunjukkan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban yang dimiliki, menjaga fasilitas sekolah, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sekolah dengan penuh tanggung jawab. Berbaris dengan rapi sebelum masuk kelas, mengantri ketika menggunakan fasilitas sekolah, dan pengelolaan uang kas kelas secara demokratis merupakan contoh konkret penerapan nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari siswa.

Implikasi yang paling menonjol dari penelitian ini adalah terbentuknya karakter siswa yang jujur dalam berbagai situasi, termasuk ketika tidak ada pengawasan langsung. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan anti korupsi menurut Juliyanti (2021) yang menjelaskan bahwa pendidikan anti korupsi diharapkan mampu menumbuhkan semangat

anti korupsi pada setiap anak bangsa serta mewujudkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Nur (2021) menyatakan bahwa anti korupsi ialah upaya sadar untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi secara konseptual, dan upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran individu sejak dini.

Dari perspektif Islam, BANSIKA & CHARLES (2024) menegaskan bahwa nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan Hadist mendorong umat untuk selalu bertazkiyah, yaitu menyucikan diri dari sifat-sifat tercela seperti keserakahan, ketamakan, dan ketidakadilan yang menjadi akar munculnya perilaku korupsi. Nilai-nilai Islam seperti amanah, adil, sabar, bersyukur, dan qanaah yang diajarkan dalam konteks agama sejalan dengan sembilan nilai anti korupsi yang diintegrasikan dalam pembelajaran PPKn. Pengintegrasian nilai anti korupsi dari perspektif spiritual ini memperkuat fondasi moral siswa untuk menolak perilaku koruptif.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perubahan perilaku siswa tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses pembiasaan yang konsisten dan berkelanjutan. Festiawan (n.d.) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh pendidik untuk menyampaikan pengetahuan dan menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik melaksanakan kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Melalui pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna, siswa tidak hanya memahami nilai anti korupsi secara kognitif tetapi juga menginternalisasikannya dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Dengan demikian, integrasi nilai anti korupsi pada pembelajaran PPKn memberikan dampak positif yang komprehensif dalam membentuk peserta didik yang memiliki karakter, integritas, dan kesadaran untuk berperilaku sesuai norma yang berlaku baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam pelaksanaan pengintegrasian nilai-nilai anti korupsi pada pembelajaran PPKn, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Tabel 6 merangkum faktor-faktor tersebut secara komprehensif.

Tabel 6. Faktor Pendukung dan Penghambat Integrasi Nilai Anti Korupsi

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1. Dukungan dari pihak sekolah melalui penyediaan aturan, program, dan budaya sekolah yang mendukung nilai anti korupsi	1. Perbedaan karakter dan latar belakang siswa yang memerlukan pendekatan individual
2. Keteladanan guru yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil	2. Masih adanya siswa yang memerlukan pengingat dan pendampingan secara terus-menerus
3. Materi PPKn yang memiliki keterkaitan erat dengan pendidikan karakter dan nilai-nilai kehidupan	3. Pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kurang mendukung
4. Antusiasme dan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran	4. Keterbatasan waktu pembelajaran PPKn untuk menyeimbangkan penyampaian materi dan pembentukan karakter
5. Kerja sama antara sekolah dan orang tua dalam pembentukan karakter siswa	

Sumber: Hasil Penelitian (2026)

Faktor pendukung utama adalah dukungan dari pihak sekolah melalui penyediaan aturan, program, dan budaya sekolah yang mendukung nilai anti korupsi. Tata tertib sekolah yang mengatur kehadiran tepat waktu, penggunaan seragam sesuai ketentuan, menjaga kebersihan lingkungan, dan berbagai aturan lainnya menjadi wahana praktik nyata nilai anti korupsi. Keteladanan guru juga menjadi faktor pendukung penting karena siswa cenderung meniru perilaku yang ditunjukkan guru. Guru yang datang tepat waktu, bersikap jujur dan adil dalam menilai, serta mematuhi aturan memberikan contoh nyata bagi siswa. Keterkaitan erat materi PPKn dengan pendidikan karakter memudahkan guru dalam mengintegrasikan nilai anti korupsi. Setiawan (2023) menyatakan bahwa PPKn tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan karakter serta keterampilan kewarganegaraan, sehingga pengintegrasian nilai anti korupsi menjadi lebih natural dan tidak terasa dipaksakan. Selain itu, antusiasme dan partisipasi aktif siswa serta kerja sama antara sekolah dan orang tua turut mendukung keberhasilan pengintegrasian.

Faktor penghambat yang ditemukan meliputi perbedaan karakter dan latar belakang siswa yang menuntut pendekatan individual dari guru. Masih adanya siswa yang memerlukan pengingat dan pendampingan secara terus-menerus dalam menerapkan nilai-nilai anti korupsi juga menjadi hambatan. Pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kurang mendukung dapat memengaruhi konsistensi penerapan nilai di luar sekolah. Keterbatasan waktu pembelajaran PPKn menjadi kendala dalam menyeimbangkan penyampaian materi dengan proses pembentukan karakter, karena pengintegrasian nilai anti korupsi memerlukan pembiasaan dan pendampingan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran PPKn di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 113 Kota Jambi telah dilaksanakan secara optimal melalui sembilan nilai yaitu kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian, kemandirian, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan, dengan proses integrasi yang mengikuti tahapan pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut menggunakan berbagai strategi pembelajaran inovatif seperti Problem Based Learning, media PowerPoint, game edukatif, diskusi kelompok, keteladanan guru, pemberian penguatan, pembiasaan rutin, dan refleksi pembelajaran. Implikasi dari integrasi nilai tersebut terbukti positif terhadap perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari, ditandai dengan meningkatnya sikap bertanggung jawab, jujur, disiplin, peduli, dan berani dalam berbagai aktivitas sekolah maupun di luar sekolah, didukung oleh faktor pendukung berupa komitmen sekolah, keteladanan guru, relevansi materi PPKn, partisipasi aktif siswa, dan kerja sama orang tua, meskipun masih terdapat hambatan berupa perbedaan karakter siswa, keterbatasan waktu, dan pengaruh lingkungan eksternal. Atas dasar temuan ini, disarankan agar guru terus mengembangkan strategi pembelajaran yang integratif dan inovatif, sekolah memperkuat program pembiasaan nilai anti korupsi secara sistematis,

orang tua dilibatkan secara aktif dalam penguatan nilai di lingkungan keluarga, dan peneliti selanjutnya mengkaji efektivitas model pembelajaran tertentu dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai anti korupsi pada jenjang pendidikan yang lebih luas.

REFERENSI

- Ahmad, E. H., Makkasau, N., Edm, M., Latifah, A., Eppang, M., Buraerah, S., Syatriani, S., Ilmiah, W. S., Suhartini, T., & Widia, L. (2023). *Metodologi penelitian kesehatan*. Rizmedia Pustaka Indonesia.
- Alfiana, R. (2021). Karakter kerja keras dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar. *Jurnal ISEJ*, 2(2), 46–49. <https://doi.org/10.37251/isej.v2i2.179>
- Amalia, S. (2022). Analisis dampak korupsi pada masyarakat. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 54–76.
- Amelia, R., Nur, P., Truvadi, L. A., & Agustina, R. T. (2023). Peran Pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter bangsa Indonesia: Tinjauan dan implikasi. *Advances in Social Humanities Research*, 1(4), 501–510.
- Anggraeni, C., & Mulyadi, S. (2021). Metode pembiasaan untuk menanamkan karakter disiplin dan tanggung jawab di RA Daarul Falaah Tasikmalaya. *Jurnal Pendidikan*, 5(1), 100–109.
- April-Juni, T. (2020). PKN: Internalisasi pendidikan anti korupsi. *Jurnal PKN*, 1, 1–17.
- Bansika, D. M. I., & Charles, C. (2024). Pendidikan anti korupsi menurut Al-Qur'an dan Hadits (Rekonstruksi pendidikan anti korupsi dalam tinjauan Qur'an dan Hadist). *Educational: Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran*, 4(4), 402–407. <https://doi.org/10.51878/educational.v4i4.3757>
- Dwijendra, U., Made, N., & Dwindayani, A. (2023). Meningkatkan sikap disiplin siswa melalui optimalisasi peran guru PPKn dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan*, 1(2), 41–48.
- Festiawan, R. (n.d.). Belajar dan pendekatan pembelajaran. *Jurnal Pendidikan*, 1–17.
- Harun, A., Triyadi, S., & Muhtarom, I. (2022). Analisis nilai-nilai sosial dalam novel Ancika karya Pidi Baiq (Tinjauan sosiologi sastra). *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 8(2), 466–474. <https://doi.org/10.30605/onoma.v8i2.1778>
- Hasibuan, P., Azmi, R., Arjuna, D. B., & Rahayu, S. U. (2023). Analisis pengukuran temperatur udara dengan metode observasi. *ABDIMAS: Jurnal Garuda Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 8–15.
- Husnullail, M., Risnita, Jailani, Syahrani, M., & Asbui. (2024). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam riset ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 71–73.
- Islam, U., Muhammad, K., & Al-Banjari, A. (2024). Dampak korupsi terhadap perekonomian di Indonesia. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 2(3), 422–430. <https://pchukumsosial.org/index.php/pchs>
- Istiqomah, M., Zahru, F. A., & Fadhilaturrahmah, N. W. (2022). Implikasi aliran pragmatisme dalam pendidikan. *Media Penelitian Pendidikan: Jurnal Penelitian dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran*, 16(2), 122–126. <https://doi.org/10.26877/mpp.v16i2.12214>
- Juliyanti, F. (2021). *Integrasi nilai-nilai anti korupsi pada siswa sekolah dasar kelas V* [Skripsi, nama institusi tidak diketahui].

- Kenneth, N. (2024). Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 335–340. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>
- Kholid, I., Rahayu, R., Fathony, M. H., Anwar, R., Nurhadi, & Nugraha. (2025). Strategi dan tantangan integrasi nilai antikorupsi dalam Kurikulum Merdeka: Kajian sistematik literatur. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 12(2), 487–497. <https://doi.org/10.38048/jipcb.v12i2.5378>
- Magdalena, I., Haq, A. S., & Ramdhan, F. (2020). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar Negeri Bojong 3 Pinang. *Jurnal Pendidikan dan Sains*, 2(3), 418–430.
- Maharany, I., Azizah, H. N., Hasanah, N. U., Imani, E. N., Arosad, M. F., Hadi, M. I., & Rizkiah, N. H. (2023). Integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran bahasa Indonesia. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(2), 341–347.
- Munthe, F. L., Renaldi, A. J., & Vincent, T. (2022). Berperilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. *Jurnal Pendidikan*, 4, 183–188.
- Nabila, S. U., Lestari, G. D., & Yulianingsih, W. (2023). Pembiasaan nilai-nilai kepedulian lingkungan pada anak usia dini melalui prinsip pembelajaran. *Jurnal Obsesi*, 7(1), 1105–1118. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i1.3859>
- Nur, S. M. (2021). Penerapan pendidikan anti korupsi kepada siswa sekolah dasar. *Jurnal Eduscience*, 6, 111.
- Pembelajaran, I., Masalah, B., Kompetensi, M., Guru, P., & Islam, K. (2024). [Judul artikel tidak dapat diidentifikasi]. *Jurnal Pendidikan Sultan Agung JP-SA*, 4(5), 223–234.
- Pendidikan, F. I., & Yogyakarta, U. N. (2012). *Multimedia pembelajaran anti korupsi*.
- Pradipta, F. S., & Widjajanti, E. (2025). Pembaharuan hukum pidana korupsi dalam pengelolaan BUMN pasca revisi UU No. 1 Tahun 2025. *Jurnal Hukum*, 4(2), 80–90.
- Perkasa, R. D. (2024). [Judul artikel tidak dapat diidentifikasi]. *Jurnal Wawasan Nusantara*, 1(9), 9–13.
- Saputra, E. E. (2025). Membangun budaya anti-korupsi melalui pembelajaran PPKn di sekolah dasar. *Jurnal Kajian Pendidikan dan Cakrawala Pembelajaran*, 1(1), 1–13. <https://jurnal.yayasanmeisyarainsanmadani.com/index.php/JAKAP/article/view/1>
- Paling, S., Sari, R., Bakar, R. M., Yhani, P. C. C., Mukadar, S., Lidiawati, L., Indah, N., Nurhamdiah, & Hilir, A. (2023). *Belajar dan pembelajaran*.
- Setiawan, A. (2023). Pendidikan anti korupsi sebagai pembentukan karakter, perilaku individu melalui potensi mahasiswa di perguruan tinggi. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 1(1), 1–9.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *Jurnal Penelitian*, 1(1), 53–61.
- Suyitno, Sukmayadi, T., & Maarif, M. (2024). Sosialisasi literasi antikorupsi berbasis profil pelajar Pancasila di Sekolah Dasar Muhammadiyah Kayen Condongcatur Yogyakarta. *Education Journal: Journal Education Research and Development*, 8(1), 126–133.
- Toha, M., Hadi, F. N., Zulvia, N., & Agustine, J. R. (2025). Active debate: Strategi pembelajaran yang mengasah nalar dan keberanian berbicara. *Jurnal Pendidikan*, 11(3), 454–474.

- Sari, W. R., & Usman, A. (2023). Profil pelajar Pancasila dalam pengembangan kreativitas pembelajaran PPKn. *Jurnal Serunai Pancasila dan Kewarganegaraan*, 12(1), 14–23.
- Widianti, N. (2022). Implikasi nilai-nilai anti korupsi dalam buku "Byur" sebagai sarana pembentukan karakter anak. *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24235/prophetic.v5i1.11169>
- Yanti, A. D., Syaifudin, M., Mulio, A. T., Hendra, D., & Marlina, E. (2024). Evaluasi kebijakan pendidikan: Strategi untuk meningkatkan kualitas dan keadilan dalam sistem pendidikan nasional. *Jurnal Kebijakan*, 4, 47–52.
- Zulkarmain, L., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2021). Pendidikan di lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3, 17–31.